

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat nilai-nilai kemajemukan Bangsa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan Asas Hukum Waris di Indonesia. Adapun berdasarkan hasil penelitian nilai-nilai kemajemukan bangsa Indonesia yang dapat menjadi dasar pengembangan Asas Hukum Waris Nasional adalah:
  - a. Nilai Kekeluargaan;
  - b. Nilai Kompromi;
  - c. Nilai Adaptif.
2. Mengenai pokok-pokok pengaturan Hukum Waris Nasional yang dapat memperhatikan kemajemukan nilai dalam masyarakat Indonesia, Pertama, Hukum Waris Nasional mengakomodir asas umum yang diperoleh dari dan dapat diterima oleh ketiga Hukum Waris yang berlaku (Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata) yakni:
  1. Asas Bilateral
  2. Asas Penderajatan

Selanjutnya Kedua adalah mengenai prosedur penyelesaian sengketa waris diutamakan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tahapan pertama menyelesaikan kasus pewarisan dengan mengutamakan Nilai Kekeluargaan untuk mendapatkan penyelesaian pembagian warisan yang terbaik bagi tiap keluarga dengan melalui pembagian warisan yang disepakati dengan jalan damai berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Tahapan kedua, apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut di tahap pertama, maka para pihak dapat melakukan Pilihan Hukum (*choice of law*) untuk menentukan hukum waris mana yang akan diberlakukan dalam penyelesaian kasus waris. Disinilah dibutuhkan adanya pengembangan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) yang khusus diberlakukan dalam Hukum Waris, serta pengaturan kewenangan pengadilan dalam penyelesaian kasus waris.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran penelitian sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Lembaga Eksekutif dan Legislatif agar segera melakukan proses pembentukan hukum waris nasional, karena pengaturan hukum waris yang saat ini berlaku, masih majemuk dan mendasarkan diri pada penggolongan penduduk menurut peraturan

kolonial. Sedangkan di lain sisi, perundang-undangan nasional telah melarang pembedaan warganegara berdasarkan suku, ras, etnis dan agama. Selain itu peraturan yang berlaku telah menghapuskan pembedaan golongan dalam akta kelahiran.

2. Disarankan kepada Lembaga Eksekutif dan Legislatif agar dalam pembentukan Hukum Waris Nasional, sebaiknya memperhatikan dan menghormati kemajemukan nilai yang ada dan hidup dalam Bangsa Indonesia, yaitu :

1. Nilai Kekeluargaan;
2. Nilai Kompromi;
3. Nilai Adaptif.

karena kemajemukan Bangsa Indonesia baik dari suku, agama dan etnis tidak dapat diabaikan, terutama terkait permasalahan pewarisan yang bersifat sensitif. Dengan demikian pembentukan hukum waris nasional tetap dapat menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia.

3. Disarankan kepada para praktisi hukum untuk memperhatikan kemajemukan nilai bangsa Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik berkedudukan sebagai hakim dalam memutuskan suatu perkara waris, atau berkedudukan sebagai pengacara yang melakukan pembelaan dan/atau penyelesaian kasus waris klien dan berkedudukan sebagai notaris dalam pembuatan Keterangan Hak Waris. Hal ini disebabkan karena kemajemukan nilai tersebut senyatanya memang ada dan hidup serta menjiwai Bangsa Indonesia.

4. Disarankan kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah warisan agar lebih memperhatikan kemajemukan nilai seperti Nilai Kekeluargaan dan Nilai Kompromi yang berlaku umum dan hidup dalam Bangsa Indonesia serta tahapan penyelesaian sengketa waris. Hal ini dikarenakan kemajemukan nilai yang ditemukan dalam penelitian ini tetap ada dan hidup serta menjiwai bangsa Indonesia.
5. Disarankan kepada para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari hasil penelitian ini, guna mencari formulasi atas substansi Hukum Waris Nasional yang bersumber pada kemajemukan nilai dan pokok-pokok pengaturan yang telah ditemukan dalam penelitian ini, karena kemajemukan nilai dan pokok-pokok pengaturan di atas memerlukan pengaturan lebih jauh dalam substansi berbagai aturan sebagai pelaksanaan dari berbagai nilai dan asas yang ada untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh warganegara Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- AB Massier, *The Voice of The Law In Transition Indonesia Jurists and Their Languages 1915-2000*, KITLV Press, Leidin, 2008
- A.F.Chalmers, *Apa itu yang dinamakan ilmu ? Suatu Penilaian Tentang Watak dan Status Ilmu Serta Metodenya*, Hasta Mitra, Jakarta, 1983
- Akhmad Basuni, *Akualisasi Pemikiran Pluralisme KH.Abdurrahman Wahid (Studi Program Pendidikan The Wahid Institute)*, Deepublish, Yogyakarta, Juni 2016
- Albertus Sutjipto Budihardjoputra, *Butir 5&6 Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 16 April 2010 No.470/671-Disduk Capil*, tulisan lepas, Bandung, tanpa tahun
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Andi Nuzul, *Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis*, Majalah Mimbar Hukum Vol.22, 2010
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Anthon F.Susanto, *Penelitian Hukum – Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015
- \_\_\_\_\_, *Kritik Nalar Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2015
- A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid I, Alih Bahasa M.Isa Arief*, PT.Intermasa, Jakarta, 1970
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid 2, Alih bahasa M.Isa Arief*, PT.Intermasa, Jakarta, 1979
- A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Artidjo Alkotsar, *Human Right Court, Indonesia and Civilization*, Pusham UII, Yogyakarta, 2003

- A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgelijk Wetboek*, Alumni, Bandung, 1982
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, PT.Dian Rakyat, Jakarta 1986
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Boediono Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- B.Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, cetakan ke 5, P.T.Alumni Bandung, 2013
- B.Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Tataanan Hukum Adat*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2011
- C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2016
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 2013
- C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, 1987
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- \_\_\_\_\_, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, November 1996
- Debiana Dewi Sudradjat, *Asas dan Penggolongan Hukum Benda*, Yrama Widya, Bandung 2019
- Dedi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Alumni, Bandung 1986

- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017
- E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Tjetakan keenam, P.T.Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Djakarta, 1961
- Eman Suparman, *Hukum Perselisihan (Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015
- Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Yogyakarta, 2004
- G.Moedjanto dkk, Pembimbing: Murniati, *Pancasila: Buku Panduan Mahasiswa*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Mei 1996
- Gouw Giok Siong, *Hukum Antargolongan – Suatu pengantar*, NV.Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta
- Hamid Algadri, *Dutch Policy Againsts Islam and Indonesians of Arab Descent In Indonesia*, Pustaka LP3ES, Indonesia, Jakarta, 1994
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris tanpa Wasiat, Cetakan II*, Penerbit : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1982
- Hendra Hudaya, *Fiqih Waris*, Gema Insani, Depok, 2018
- H.Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014
- Hermayulis, *Terbentuk dan Pembentukan Hukum (Suatu Pemikiran dalam Reformasi Hukum di Indonesia)*, *Hukum dan Kemajemukan Budaya (sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof Dr T.O.Ihromi)* ed.E.K.M.Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
- Howard Davies, David Holdcroft, *Jurisprudence Texts and Commentary*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1991
- H.L.A.Hart, *The Concept of Law*, Second Edition, Clarendon Press Oxford, 1994
- H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015



- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2014
- H.A.Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Cetakan ke 9, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat-Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Indra Nolind, *UUD 1945 & Amandemen*, Pustaka Tanah Air, Bandung, Februari 2011
- Jaspan M.A, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, tulisan Bab VII: Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang membingungkan*, ed.Mulyana W.Kusumah dan Paul S.Baut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
- John Horgan, *The End of Science Senjakala Ilmu Pengetahuan*, Peraju, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *The End of Science Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age*, Broadway Books, New York, 1953
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, 1973
- Komar Andasmita, *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam*, Ikatan Mahasiswa Notariat (IMNO) UNPAD, Bandung, 1984
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 17, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum – Universitas Padjajaran, Penerbit Binacipta, April 1975
- \_\_\_\_\_, dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan keenam, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Muhammad Bakri, *Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*, Jurnal Kertha Patrika, Januari 2008
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014
- M.J.A.Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, Penyadur : F.Tengker, PT.Eresco, Bandung, 1993
- M.L.Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta
- M.M.Djojodigono, *Adat Law in Indonesia*, Jajasan Pembangunan Djakarta
- M.T.Felix Sitorus, *Hak Waris Janda dan Anak Perempuan Batak Toba Masa Kini, dalam buku Hukum dan Kemajemukan Budaya (sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof Dr T.O.Ihromi)* ed.E.K.M.Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
- M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2019
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan kesembilan, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1980
- Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cetakan Kedelapan, PT Refika Aditama, Bandung, 2015
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV.Rajawali, Jakarta, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

- Peter J Burns, *The Leiden Legacy Concepts of Law In Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1992
- Rene David and John E.C.Brierley, *Major Legal Systems In The World Today*, Third Edition, Steven & Sons, London, 1985
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2019
- Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T.Alumni, Bandung, 2006
- R.O. Tambunan, *Masalah Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional dan Pemrioritasan Bidang Hukum yang Akan Dibina, Sesuai dengan Urgensi Tahap-Tahap Pembangunan, Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan BPHN*, Binacipta, Banda Aceh, 4 - 6 Oktober 1976
- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Fontana Press, Great Britain, 1991
- \_\_\_\_\_, *A Matter of Principle*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1985
- \_\_\_\_\_, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1977
- R.Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cetakan ke 12, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- R.Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1982
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta, 1982
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979

- Rumonda Nasution, *Harta Kekayaan Suami Isteri dan Kewarisannya*, BPHN, Jakarta, 1992
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Cetakan kelima, Sumur Bandung, 1962
- R.M. Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan : Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan The Asia Foundation, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perubahan Sosial-Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979
- Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Soebekti.R, *Yurisprudensi, Hukum Tidak Tertulis dan Hukum Adat dalam Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan Nasional, kertas kerja pada Simposium Pola Umum Hukum dan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh 4 – 6 Oktober 1976*, Binacipta, Bandung, 1977
- Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, cetakan ketiga, Binacipta, Bandung, 1978
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Karangan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1965
- \_\_\_\_\_, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Binacipta, Bandung, 1968
- \_\_\_\_\_, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Gatra Pusaka, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pusaka, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1986
- \_\_\_\_\_, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987

- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT.Gramedia, Jakarta, 1989
- Soleman B.Taneko, *Hukum Adat-suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang*, Eresco, Bandung, 1987
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIII, PT.Intermasa, Jakarta, 2011
- \_\_\_\_\_, *Kertas Kerja pada Simposium Sejarah Hukum yang dilaksanakan oleh BPHN: Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia oleh Yurisprudensi*, Binacipta, Jakarta 1 – 3 April 1975
- Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*, cetakan I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- \_\_\_\_\_, *Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977
- \_\_\_\_\_, *Hukum Antargolongan (Suatu Pengantar)*, PT.Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1984
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan kelima, Binacipta, Bandung, 1987
- \_\_\_\_\_, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblaad 1898 No.158)*, Cetakan ke IV, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- \_\_\_\_\_, *Essays In Indonesia Law*, cetakan ke II, PT.Citra Aditya Bakri, Bandung 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cetakan kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001
- Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016
- Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, cetakan VI, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- \_\_\_\_\_, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, cetakan pertama, Penerbit Binacipta, Nopember 1976
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, Maret 2018

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Berpancasila dalam Optik Pluralisme Masyarakat Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Tjok Isteri Putra Astiti, *Hak-Hak Wanita Bali dalam Hukum Adat Waris, dalam buku Hukum dan Kemajemukan Budaya (sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof Dr T.O.Ihromi)* ed.E.K.M.Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar-Golongan (Intergentiel) di Indonesia*, Cetakan kelima, Sumur Bandung, 1976

\_\_\_\_\_, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Tjetakan keempat, Sumur Bandung, Bandung, 1961

Z Ansori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek Staatsblaad 1847 Nomor 23 masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 131 dan 163 *Indische Staats Regeling* (IS).

Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Jakarta tertanggal 20 Desember 1969 Nomor : Dpt/12/63/12/69.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997.

#### **JURNAL :**

Wagiman, *Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum : Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*, Jurnal Filsafat Hukum, Vol 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jaih Mubarak, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, salah satu tulisan dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, ed.Muchit A.Karim, Jakarta, Oktober 2012

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Waris*, dibawah pimpinan Dr.Komari, 2011

H.Sarwohadi, *Penetapan Ahli Waris Dan P3HP/Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan, Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Nusa Tenggara Barat*, Artikel, Mataram,14 Agustus 2017

## **SIMPOSIUM :**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan*, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh 4 - 6 Oktober 1976, Binacipta

\_\_\_\_\_, *Simposium Sejarah Hukum*, Jakarta, 1 – 3 April 1975, Binacipta, 1976

\_\_\_\_\_, *Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-Undangan*, Banda Aceh, 4 – 6 Oktober 1976, Binacipta, 1977

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Law Reform Policies (Recommendations)*, Desember 2003

Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, *Statistik Kebudayaan 2016*, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, ed : Muchit A.Karim, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, 1988

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ed : Mulyana W.Kusumah dan Paul S.Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta, 2012

## **SITUS DARING :**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://kbbi.web.id>

[http://bphn.go.id/readinfo/main\\_history](http://bphn.go.id/readinfo/main_history)

<https://id.wikipedia.org>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

## **DATA :**

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 2016, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebudayaan 2016